

**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR  
DI PANTAI TRISIK DESA BANARAN KECAMATAN GALUR  
KABUPATEN KULON PROGO**

Sri Utami

**Abstract**

*As with other coastal communities, coastal communities Trisik Beach has a similar problem. The wealth of natural resources in the Coastal Trisik not been able to lift themselves out of poverty. Community empowerment is necessary Trisik coast of an effort that is planned, systematic, and continuous to develop the independence of social, economic, political and fishing communities to manage potential resource at their disposal to achieve sustainable social welfare. There are at least five coastal community empowerment approach that can be implemented on the coast of Trisik, namely: (1) creation of alternative employment as a source of income for the family, (2) Bringing the public on sources of capital with an emphasis on the creation of self-financing mechanisms (self-financing mechanism), (3) Bringing the community with a source of new technology more effective and efficient, (4) Bringing communities to the market, and (5) build solidarity and collective action in the community. These five approaches should be implemented with regard seriously the aspirations, needs, income, desire and potential resources owned by the community.*

**Keywords:** *Empowerment, Coastal Communities, Poverty*

**Pendahuluan**

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Definisi ini pun bisa dikembangkan lebih lanjut karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri atas nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, *supplier* sarana

produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir terdiri atas penjual jasa pariwisata, transportasi, serta kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya (Victor, 2001).

Wilayah pesisir pantai di Indonesia dikenal sebagai kawasan masyarakat miskin, kumuh dan terbelakang. Kondisi ini sangat ironis apabila dibandingkan dengan keadaan alam wilayah pesisir yang kaya sumber daya alam dan potensial dikembangkan secara ekonomi. Menurut Siahaan (Islamy dkk., 2005) daerah pesisir, umumnya merupakan kantong-kantong kemiskinan struktural yang sangat kronis. Yaitu kemiskinan yang dilimbulkan akibat adanya tekanan ekonomi dan eksploitasi dari kelompok masyarakat, sehingga nelayan miskin tetap menjadi sangat "marginal".

Indonesia memiliki kawasan pesisir sangat luas yang dihuni sekitar 2 juta nelayan dan petambak, diperkirakan 60% nelayan di desa rata-rata pendapatannya di bawah kebutuhan minimalnya (Dahuri, dkk, 1996:31). Sangat ironis sekali dengan potensi yang begitu besar, saat ini masih banyak penduduk pantai yang memiliki taraf hidup tergolong rendah. Kemampuan nelayan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal kehidupan sangat terbatas. Bagi masyarakat nelayan, di antara beberapa kebutuhan pokok, yang paling penting adalah pangan. Walaupun para nelayan mengambil peranan yang sangat signifikan dalam peningkatan produktivitas perikanan nasional, tetapi hal tersebut tidak berkorelasi terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

Menurut Kusnadi (2006), masyarakat pesisir menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut di-antaranya adalah: (1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan ekonomi yang datang setiap saat; (2) keterbatasan akses modal; (3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada; (4) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik; (5) degradasi sumber daya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil; dan (6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Seperti halnya dengan masyarakat pesisir lainnya, masyarakat pesisir Pantai Trisik Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo memiliki permasalahan yang hampir sama. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Pantai Trisik belum mampu mengangkat mereka dari jurang kemiskinan. Sejumlah permasalahan yang dijumpai di masyarakat Pantai Trisik di-antaranya adalah keterbatasan akses modal, belum terbangunnya peluang diversifikasi usaha, pola hidup yang belum ekonomis, dan lemahnya manajemen usaha dan kewiraswastaan. Rumusan masalah yang muncul dari kondisi tersebut adalah : Bagaimana model pemberdayaan masyarakat yang tepat bagi masyarakat pesisir Pantai Trisik tersebut?

## **Kajian Literatur Model Pemberdayaan**

### **1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang dan belum berdaya (Sulistiyani 2004:77).

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa kelompok rentan atau lemah memperoleh daya, kekuatan, dan kemampuan dari kelompok yang memiliki kekuatan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki seperti kekuasaan, materi, ilmu pengetahuan, teknologi dll. Menurut Ite dalam Suharto (2005:59), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup : kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

- c. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- e. Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi : kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat menurut Winami dalam Sulistiyani (2004:79) mengungkapkan bahwa inti pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), tercipta kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang terbatas, dapat

dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

## 2. Konsep Kemitraan

Defenisi kemitraan merupakan suatu upaya kolaboratif yang terus menerus guna mencapai tujuan bersama. Kemitraan merupakan kerjasama di antara dua atau lebih pihak (komponen) yang saling terkait dan bekerjasama sebagai mitra, serta sebagai perwujudan usaha bersama, bahkan dengan adanya komitmen bersama.

Berdasarkan definisi tersebut, berarti dalam kemitraan mengandung unsur :

- a. Terdapat dua atau lebih pihak (komponen) yang terlibat yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b. Keduanya bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada yang sifatnya membawahi pihak lain.
- c. Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai.
- d. Setiap pihak memiliki tanggung jawab sendiri.
- e. Setiap pihak memberikan *input* berupa finansial, teknologi, pengetahuan atau sumber daya lainnya dalam sebuah proses pembelajaran.

Pola kemitraan tersebut memerlukan upaya yang efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep dan pengertian kemitraan yang dimaksudkan adalah keterkaitan dan keterlibatan pihak pemerintah, masyarakat, swasta atau kelompok peduli lainnya untuk ikut melakukan pelayanan urusan publik, ikut melayani tugas-tugas pelayanan yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penanganan berbagai permasalahan publik tanpa melibatkan unsur-unsur non pemerintah, mengakibatkan pemerintah kerepotan. Profesionalisme yang belum begitu kuat di kalangan birokrasi pemerintah merupakan salah satu masalah utama jika pemerintah tidak mau mengikutsertakan *non-government institution*. Sumber kekuasaan yang semakin menyebar di tingkat daerah, mengharuskan pemerintah daerah mengadopsi model *partnership* sebagai

paradigma baru dalam menjalankan fungsi publik.

Dalam pola kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dapat melakukan pembagian kerja yang wajar dan saling melengkapi sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah biasa memusatkan perannya sebagai regulator, fasilitator dan promotor penyelenggaraan pelayanan publik. Swasta karena kemampuannya dalam memberi respon terhadap kebutuhan masyarakat secara cepat dan efisien, biasa lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan operasional terutama dalam produksi dan distribusi pelayanan publik. Untuk pelayanan publik tertentu yang bersifat lokal, unik dan spesifik maka masyarakat akan dapat berperan secara efektif dibandingkan dengan pemerintah dan swasta (Agus Dwiyanto, 1996:17)

Semakin besar kemampuan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memusatkan perhatiannya pada fungsinya yang lebih strategis sebagai regulator, fasilitator dan promotor pelayanan publik. Kemitraan antara masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjadi satu upaya untuk melakukan demokratisasi. Melalui cara ini, inisiatif dan partisipasi masyarakat untuk memperbanyak alternatif sumber pelayanan publik, di samping pemerintah, akan dapat ditingkatkan. Kemitraan memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mewujudkan *good governance* (Agus Dwiyanto, 1996:18).

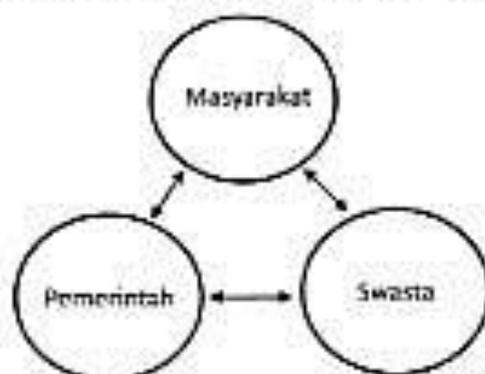
Sektor swasta dalam hal ini tidak saja perusahaan swasta atau dunia usaha, tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat lainnya non pemerintah seperti LSM, NGO, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan.

Tujuan kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberi keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak

yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat, memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lain. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau *subordinate*, memiliki kesamaan misi atau misi berbeda tetapi saling mengisi/melengkapi secara fungsional (Sulistiyani, 2004:130).

Untuk menciptakan satu kesatuan peran yang sinergis dalam komponen pemerintah, masyarakat dan swasta maka ketiga komponen tersebut harus mampu menciptakan keseimbangan peran dalam menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga tidak ada salah satu komponen yang mempunyai domain dan kedudukan yang dominan. Dengan adanya keseimbangan peran, semua komponen dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik sehingga akan tercipta satu kesatuan peran yang sinergis. Keseimbangan peran dari ketiga komponen tampak pada gambar dibawah ini.

**Gambar 1**  
**Tiga Komponen dalam Kemitraan**



Pemberdayaan masyarakat pesisir Pantai Trisik sangat diperlukan sebagai usaha-usaha yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Kemandirian

masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan. Dengan demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subyek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi yang dinamis. Program pemberdayaan harus dapat mendorong terciptanya mobilitas vertikal masyarakat nelayan (Kusnadi, 2009).

Beberapa indikator kualitatif yang menandai bahwa suatu masyarakat nelayan (pesisir) memiliki keberdayaan adalah sebagai berikut (Kusnadi dkk, 2007):

1. Tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi : individu, rumah tangga dan masyarakat, yang ditandai dengan hal-hal berikut : a). Kemandirian ekonomi berkembang, orientasi kewirausahaan meningkat, dan kepercayaan diri menguat; b). Nilai tabungan dan investasi bertambah; c). Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi optimal dan berkelanjutan; d). Kondisi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkembang baik.
2. Kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada dapat berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil-kontinuitas.
3. Kelembagaan sosial atau pranata budaya berfungsi dengan baik sebagai instrumen aspirasi pembangunan lokal.
4. Potensi sumber daya lingkungan sebagai basis kehidupan masyarakat pesisir terpelihara kelestariannya dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
5. Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi : informasi, kapital, pasar, teknologi, dan jaringan kemitraan.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir.
7. Kawasan pesisir menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

Setidaknya ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat diimplementasikan pada masyarakat pesisir Pantai Trisik. Kelima pendekatan tersebut adalah : (1) Penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga; (2) Mendekatkan masyarakat pada sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*); (3) Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna; (4) Mendekatkan masyarakat dengan pasar; serta (5) Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yang bertujuan mengetahui model pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat pesisir Pantai Trisik, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara kepada informan kunci untuk data primer, serta menggunakan dokumentasi untuk data sekunder. Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah pedoman wawancara. Adapun analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

### **Pembahasan**

#### **1. Kondisi Geografis dan Kependudukan**

Pantai Trisik terletak ± 36 km dari pusat Kota Yogyakarta. Terletak di antara 7°10'8" hingga 7°11'13" Lintang Selatan dan 110° 17' hingga 110° 20' Bujur Timur. Pantai ini terletak di Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi DI Yogyakarta. Pantai Trisik terletak di sebelah barat muara Sungai Progo yang banyak membawa bahan vulkanik dari Gunung Merapi. Laut Pantai Trisik adalah Samudera Indonesia yang bergelombang besar. Pantai Trisik terdiri dari gumuk-gumuk pasir yang terbentuk selama ribuan tahun. Tanah Pantai Trisik terdiri atas tanah pasir pantai, tanah tegal dan tanah sawah. Tanah pasir pantai terletak di pinggiran laut. Tanah ini banyak mengandung bijih besi, bercampur dengan endapan vulkanik. Kandungan bijih besi

memberikan potensi untuk pertambangan. Tanah dari endapan gunung berapi ini berasal dari bahan induk batuan vulkanik dan sedimen, warna tanah kelabu kehitaman, tekstur agak kasar, struktur lemah dengan didominasi oleh pasir, tingkat keliatan dan kelekatan yang rendah, serta derajat keasaman/PH antara 6-6,5.

Tanah tegal terletak agak masuk ke daratan, terdiri atas lahan kering yang ditanami palawija. Struktur tanah di sini sudah berubah dari tanah pasir pantai asli. Tanah ini sudah mengalami pelapukan dan bercampur dengan kompos pupuk kandang, pupuk hijau dan pelapukan sisa-sisa tanaman. Kondisi tanah sudah agak lebih subur dari tanah pasir pantai.

Tanah sawah terletak agak jauh dari pantai terdiri atas tanah lempung pasiran. Tanah ini banyak mengandung endapan vulkanik dari Sungai Progo yang mengalir melalui saluran irigasi primer, sekunder serta tersier. Tanah ini mengandung unsur-unsur yang berasal dari pupuk kandang, pupuk hijau, serta pelapukan sisa tanaman baik tanaman pertanian maupun gulma. Tanah sawah ini lebih basah dibanding tanah tegal.

Agak jauh dari kawasan pantai, air irigasi diambil dari saluran yang mengalir melalui tengah Desa Banaran menuju Pantai Trisik, sebagian airnya mengisi laguna di Pantai Trisik dan sebagian lagi bergabung dengan muara Sungai Progo. Saluran ini dibangun sejak jaman penjajahan Belanda, untuk dapat mengairi sawah di-sekitarnya.

Kawasan pantai sendiri adalah kawasan yang kering. Secara alami lahan pantai hanya mendapatkan air dari air hujan. Namun para petani berusaha mengairi sawah mereka dengan air sumur yang dipompa atau ditimba. Ada embung besar di sebelah utara pusat Pedukuhan Trisik yang menampung air sungai yang dipompa. Embung ini dibangun atas bantuan Sri Paduka Paku Alam VIII. Dari embung ini, air disalurkan ke lahan-lahan pertanian penduduk melalui pipa-pipa pralon. Petani yang jauh dari embung membuat sumur-sumur untuk mengairi lahan. Mereka menampung air yang ditimba atau dipompa dari sumur di bis-bis beton yang dipasang di segala tempat di lahannya.

Vegetasi pantai yang nampak dominan adalah tanaman pandan, kaktus, jenis rumput regulung, baiduri dan jenis rumput teki. Tanaman pohon atau tanaman keras yang banyak dijumpai adalah tanaman akasia,

sonokeling, jambu, dan nipah. Juga sebagian adalah tanaman budidaya seperti mangga, rambutan, jambu dan jeruk. Tanaman palawija seperti ketela pohon, cabai merah, jagung, melon, mentimun, semangka dan buah naga.

Sebagaimana masyarakat pesisir di daerah lainnya, salah satu mata pencaharian masyarakat pesisir Pantai Trisik adalah sebagai nelayan. Di pinggiran pantai banyak dijumpai berjajar perahu-perahu yang digunakan nelayan untuk mencari ikan. Perahu yang digunakan di sini adalah perahu kecil dengan penyangga di kiri kanannya agar tidak mudah terbalik bila terhempas ombak. Perahu-perahu ini menggunakan mesin penggerak motor tempel. Motor yang ditempelkan pada bagian belakang perahu. Ada 3 atau 4 awak yang mengoperasikan setiap perahu bila mereka melaut untuk mencari ikan. Kebanyakan nelayan di Pantai Trisik tidak memiliki perahu sendiri. Mereka mengoperasikan perahu milik juragan dengan status buruh. Sehingga pendapatan mereka akan berkurang karena harus berbagi dengan juragan mereka. Penghasilan nelayan Pantai Trisik tidak tetap. Pada saat ikan sedang banyak, penghasilan mereka dapat mencapai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu) per hari. Namun pada saat paceklik ikan, mereka tidak mempunyai penghasilan apa-apa. Pada saat panen ikan, keluarga nelayan biasa membelanjakan uang mereka secara boros. Misalnya untuk membeli barang-barang seperti TV, VCD *player*, dan sepeda motor. Namun pada masa-masa paceklik mereka menjualnya kembali.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah jantung bagi warga Trisik yang berprofesi sebagai nelayan. Di tempat inilah aktivitas jual beli ikan berlangsung pada saat nelayan selesai melaut mencari ikan. Di samping TPI terdapat gubug-gubug kecil para nelayan dengan jaring atau jala yang sedang digantung atau sedang diperbaiki.

Di samping sebagai nelayan, sebagian masyarakat Pantai Trisik berprofesi sebagai petani. Lahan pasir di Pantai Trisik sifatnya kering, sehingga secara alami pada musim hujan tumbuhan akan tumbuh sementara pada musim kemarau akan kering. Pergantian musim ini mempengaruhi penghasilan petani Pantai Trisik. Di lahan pantai yang kering dan kurang subur ini petani lebih banyak menanam palawija

dibanding padi. Dalam mengolah lahan petani Pantai Trisik lebih banyak menggunakan pupuk kandang dan pupuk hijau dibanding pupuk buatan pabrik. Hal ini dikarenakan pupuk kandang dan pupuk hijau dianggap lebih murah. Umumnya para petani memiliki beberapa ekor ternak seperti sapi, kerbau dan kambing di rumahnya.

Beberapa petani mencoba menanam dengan menggunakan plastik sebagai media yang digelar di bawah lahan tanam. Di atas plastik ditebarkan tanah dan pupuk kompos. Plastik menahan air yang terkandung dalam media di atasnya. Sehingga bila diamati seperti menanam tanaman pada *polybag* besar dan luas. Menurut petani yang mencoba cara ini hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan menanam langsung pada lahan pasir.

Kasijo (57 tahun) mencoba menggunakan sabut sobagai alas. Di atasnya di berikan tanah dan pupuk kompos. Hasilnya luar biasa. Menurutnya dengan cara ini setiap togor buah naga dapat menghasilkan 50-150 kg buah setiap tahunnya. Tanaman yang ditanam para petani di lahan pasir adalah tanaman palawija seperti cabai merah keriting, cabai rawit, labu, semangka, melon, kacang tanah, mentimun dan buah naga. Sedang tanaman yang ditanam di lahan sawah yang lebih basah adalah padi di musim hujan, dan palawija di musim kemarau.

Profesi lain masyarakat Pantai Trisik adalah sebagai pedagang ikan di TPI atau membuka warung dari gedheg bagi wisatawan yang berkunjung.

## **2. Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif**

Pengembangan mata pencaharian alternatif dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa sumber daya pesisir secara umum dan perikanan langkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan degradasi. Data empiris menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak nelayan yang berkonsentrasi di perairan tertentu. Malahan secara nasional, tampaknya jumlah nelayan juga sudah berlebihan. Potensi ikan laut yang tersedia, kalau memang benar estimasinya, sudah tidak mampu dijadikan andalan bagi peningkatan kesejahteraan. *Overfishing* telah terjadi di beberapa perairan Indonesia. Di Selat Makasar pemanfaatan sumber daya

perikanan sekitar 112,3% dan total potensi lestari, di Laut Jawa sekitar 88,98% dan Laut Flores 66,7% (Pratikto, 2003 dalam Marfai 2005). Kalau jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap betul-betul diambil semuanya maka berdasarkan perhitungan kasar secara rata-rata, nelayan sangat sulit untuk sejahtera.

Ada banyak alasan yang mendasari terlalu banyaknya jumlah nelayan, jika diperhadapkan dengan jumlah ikan yang terbatas, diperkirakan sekitar 6,2 juta ton per tahun potensi lestari. Namun salah satu alasan mendasar dan perlu dikaji lebih jauh yaitu status sumberdaya perikanan yang *de facto* akses terbuka. Akses terbuka atas sumberdaya ikan membawa serangkaian dampak yang berakhir pada kemiskinan. Ilustrasi drama dampak akses terbuka yaitu bahwa dengan segala upaya untuk menangkap seluruh jenis ikan yang diperbolehkan, pendapatan per keluarga nelayan hanya sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan. Dengan ilustrasi seperti ini maka pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan adalah suatu keharusan. Pengembangan mata pencaharian alternatif ini diarahkan untuk mengalihkan profesi nelayan atau sebagai tambahan pendapatan. Dengan kata lain, program diversifikasi usaha bagi nelayan untuk dikembangkan, yang dapat diarahkan bukan saja untuk nelayan tetapi juga untuk anggota keluarganya, teristimewa istri nelayan yang memang besar potensinya. Pengembangan mata pencaharian alternatif bukan saja dalam bidang perikanan, seperti pengolahan, pemasaran, atau budidaya ikan, tetapi patut diarahkan ke kegiatan non-perikanan. Diversifikasi usaha yang cukup menjanjikan sementara ini adalah budidaya buah naga, melon, semangka dan sejenisnya. Untuk buah naga masih sebatas dijual langsung ke konsumen, padahal dapat diolah lebih lanjut menjadi sirup, selai, daging buah yang sudah diproses menjadi sirup dapat dijadikan masker wajah. Dengan cara demikian dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Namun sebelumnya perlu memberikan bekal keterampilan praktis kepada kaum perempuan tentang teknologi tepat guna cara memproses buah naga hingga menjadi komoditi yang lebih prospektif. Termasuk juga keterampilan membuat tas, sepatu, sandal, dan sejenisnya dari bahan baku pandan laut yang telah tersedia. Untuk

pewarnaan dapat memanfaatkan kulit buah naga yang berwarna pink, merah, dan ungu. Smith (1983) berargumentasi bahwa bila kondisi akses terbuka masih saja terjadi maka apapun upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan, baik pada kegiatan penangkapan ikan maupun pada kegiatan yang berkaitan seperti pada pengolahan dan pemasaran ikan tidak akan memberikan hasil peningkatan kesejahteraan. Jadi masalah utamanya adalah perlunya penataan sumberdaya perikanan secara lebih baik sehingga drama akses terbuka tidak terjadi. Belum lagi jika kita bicara maraknya pencurian ikan di wilayah teritorial Indonesia oleh nelayan asing yang menggunakan teknologi lebih modern sehingga hasil tangkapannya jelas lebih banyak.

### 3. Akses Terhadap Modal

Elemen kedua strategi pemberdayaan nelayan adalah pengembangan akses modal. Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya saat ini masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status pendidikan nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memenuhi syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan, seperti perlu adanya *collateral*, *insurance* dan *equity*.

Dengan memperhatikan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir akan modal ini, maka salah satu alternatif adalah mengembangkan mekanisme pendanaan diri sendiri (*self financing mechanism*). Bentuk dari sistem ini adalah pengembangan lembaga keuangan mikro, dan nantinya makro, yang dikhususkan dalam bidang usaha di pesisir, utamanya bidang perikanan.

Dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan atau Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat berperan dalam upaya pemberdayaan dengan memberikan program modal bergulir bagi pelaku pembangunan. Memberdayakan masyarakat pesisir dalam sektor perikanan atau pertanian. Jika saat ini baru beberapa orang yang dapat

membudidayakan buah naga dikarenakan keterbatasan keterampilan dan modal, maka dinas terkait dapat berkoordinasi untuk memberdayakan nelayan Pantai Trisik yang berusaha memanfaatkan waktu luang dengan menanam buah naga atau tanaman sejenisnya. Dengan demikian maka nelayan yang sedang tidak melaut dapat memanfaatkan waktunya untuk bertani, agar memperoleh penghasilan alternatif di luar hasil tangkapan ikan yang tidak rutin sepanjang waktu.

#### **4. Akses Terhadap Teknologi**

Teknologi yang digunakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya meningkatkan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran.

Upaya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi belum banyak dilakukan. Hal ini karena adanya kesulitan untuk mengidentifikasi jenis dan tipe teknologi yang dibutuhkan masyarakat. Seringkali, justru masyarakatlah yang lebih maju dalam mencari dan mengadopsi teknologi yang diinginkan. Sehingga kadang-kadang pemerintah tertinggal. Dengan kata lain, dalam hal teknologi masyarakat lebih maju dari pemerintah. Kesulitan lain dalam hal akses teknologi yaitu kurangnya atau tidak adanya tenaga penyuluh lapangan atau mereka yang berfungsi sebagai fasilitator dan katalisator. Pada awalnya memang ada penyuluh perikanan yang memerankan tugas ini. Namun konsolidasi yang dilakukan pemerintah untuk memfungsikan penyuluh perikanan dalam menyediakan akses teknologi bagi masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Teknologi biasanya terkait dengan investasi. Jika masalah modal dapat diusahakan penyelesaiannya dengan program modal bergulir, maka dapat diupayakan rekayasa teknologi tepat guna. Misalnya saja untuk pengasapan ikan jika ikan hasil tangkapan masih dapat diupayakan peningkatannya. Atau teknologi yang dapat dipergunakan untuk proses pembuatan sirup dan selai buah naga dan rosela, masker buah naga atau mentimun. Atau bahkan pemintalan benang dari bahan dasar kapas pantai

yang juga tumbuh di Pantai Trisik.

#### **5. Akses Terhadap Pasar**

Pasar adalah faktor penarik dan dapat menjadi salah satu kendala utama bila pasar tidak berkembang. Karena itu maka membuka akses pasar adalah cara untuk mengembangkan usaha, sebab bila tidak ada pasar maka usaha sangat terhambat perkembangannya. Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat pesisir maka upaya yang dilakukan adalah mendekatkan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar yang juga adalah eksportir komoditas perikanan, dan hasil-hasil agrobisnis serta agro industri yang dihasilkan (berbagai jenis buah dan segala produk turunannya : sirup, selai, masker, serta tas, sepatu, topi dan sebagainya). Untuk itu maka kontrak penjualan produk antara masyarakat nelayan dengan perusahaan ini perlu dilaksanakan. Keuntungan dan hubungan seperti ini yaitu masyarakat mendapat jaminan pasar dan harga, pembinaan terhadap masyarakat terutama dalam hal kualitas barang dapat dilaksanakan, serta sering kali masyarakat mendapat juga bantuan modal bagi pengembangan usaha.

Meskipun hubungan seperti ini sudah ada, secara umum boleh dikatakan bahwa masyarakat masih menghadapi pasar yang tidak sempurna strukturnya, monopoli ketika masyarakat membeli faktor produksi serta monopsoni ketika masyarakat menjual produk yang dihasilkan. Struktur pasar yang tidak menguntungkan masyarakat ini disebabkan karena informasi yang kurang mengenai harga, komoditas, kualitas, kuantitas serta kontinuitas produk. Kelangkaan informasi ini begitu rupa sehingga umumnya masyarakat hanya menghasilkan produk-produk yang serupa sehingga akhirnya membuat kelebihan pasokan dan jatuhnya harga.

Dengan konsep kemitraan antara masyarakat pantai, lembaga pemerintah terkait dan pihak swasta mestinya dapat menghilangkan monopoli dan monopsoni yang selama ini merugikan masyarakat pantai. Dinas-dinas terkait dapat berperan sebagai mediator, fasilitator, koordinator serta dinamisator antara para nelayan (yang sekaligus

sebagai petani dan pengrajin atau pengusaha mikro) dengan pihak swasta, dalam posisi yang sejajar dan saling menguntungkan. Di antara ketiga komponen tersebut harus mampu menciptakan keseimbangan peran dalam menjalankan fungsinya masing-masing sehingga tidak ada salah satu komponen yang mempunyai kedudukan dominan. Dengan demikian akan tercipta satu kesatuan peran yang sinergis.

## **6. Pengembangan Aksi Kolektif**

Pemberdayaan melalui pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama. Hanya di sini istilah yang digunakan adalah aksi kolektif yaitu untuk membuka kesempatan kepada masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang diinginkannya yang tidak semata-mata koperasi atau kelompok usaha bersama. Aksi kolektif merupakan suatu aksi bersama yang bermuara pada kesejahteraan setiap anggota secara individu.

Upaya pengembangan aksi kolektif yang dilakukan selama ini melalui pengembangan kelompok berbasis agama seperti koperasi pondok pesantren, kelompok-kelompok yang beraliansi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu yang memang memiliki staf dan dana untuk pembangunan masyarakat pesisir. Kelompok yang juga mendapat perhatian adalah kelompok perempuan dengan penekanan pada peranan mereka dalam usaha meningkatkan ekonomi keluarga.

Pengembangan aksi kolektif ini masih sangat prematur dan memerlukan kajian untuk mencari bentuknya yang sungguh-sungguh berguna bagi masyarakat. Beberapa aksi kolektif yang pernah berkembang memang tidak begitu mumpuni sebagai ide dan gagasan masyarakat, seperti perikanan inti rakyat serta kemitraan usaha antara masyarakat dan pengusaha besar yang tidak berpihak kepada masyarakat dan berhenti di tengah jalan. Ini terjadi karena aksi semi-kolektif tersebut sangat bias kepada kepentingan pengusaha.

Somestinya institusi pemerintah terkait bertugas mendampingi dan memfasilitasi masyarakat nelayan, sekaligus sebagai petani dan pengrajin ini, untuk secara konsisten tetap menerapkan strategi membangun ekonomi masyarakat yang berbasis kelompok. Strategi ini berfokus pada

fasilitas untuk mewujudkan semakin eksisnya kelompok sebagai wadah pelaku usaha untuk berproduksi, saling belajar dan bertukar pengalaman. Termasuk juga dalam pemasaran bersama guna meningkatkan *collective bargaining position* sehingga mengurangi resiko tereksplorasi oleh yang kuat. Basis kelompok juga merupakan jawaban atas kepemilikan hasil tangkapan ikan yang terbatas, sehingga terwujud besaran usaha yang mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan.

Prinsip utama yang dikembangkan dalam membangun ekonomi masyarakat yang berbasis usaha kecil adalah dengan menumbuhkan partisipasi pelaku usaha untuk secara aktif mengembangkan kegiatan ekonominya, sehingga diharapkan lebih menjamin nilai tambah yang dihasilkan, lebih optimal dan langsung mereka terima, serta pemerataan akan terwujud bersamaan dengan pertumbuhan yang terjadi. Selanjutnya akan berkorelasi terhadap peningkatan daya beli. Dampak lebih lanjut masyarakat akan lebih mampu membangun dirinya (*self empowering*) menuju kemandirian serta mengembangkan modal finansial dan modal sosial mereka.

#### **Kesimpulan dan Saran**

1. Permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir adalah kemiskinan, keterbatasan akses modal, kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi, kualitas SDM yang rendah akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, degradasi sumber daya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut, dan belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.
2. Sumber daya pesisir secara umum dan perikanan tangkap secara khusus telah banyak mengalami tekanan dan degradasi, untuk itu diperlukan diversifikasi usaha dan pendapatan dengan model kemitraan.
3. Program diversifikasi semestinya bukan hanya diarahkan pada nelayan saja, tapi juga pada anggota keluarganya, seperti istri dan anak-anaknya.
4. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian, serta resiko

tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini, perlu kiranya dikembangkan dengan program modal bergulir yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga pemerintah terkait bekerja sama dengan perbankan atau sektor swasta.

5. Beberapa pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat diimplementasikan pada masyarakat pesisir Pantai Trisik, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo adalah penciptaan lapangan kerja alternatif, mendekatkan masyarakat dengan program modal bergulir, dengan sumber teknologi tepat guna yang lebih berhasil dan berdaya guna, dengan pasar, serta membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.
6. Kelima pendekatan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat setempat.
7. Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya pemberdayaan ini adalah masyarakat setempat lebih mampu membangun dirinya (*self empowering*) menuju kemandirian serta pengembangan modal finansial dan modal sosial mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dahun, R., dkk. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta : PT.Pradnya Paramita.
- Dwiyanto, Agus. 1996. "Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Relevansi Terhadap Reformasi Administrasi Negara" dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 1, No.1, Mei 1996.
- Islamy, I. 2005. *Desain Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta : P3KS Depsos RI.
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Kusnadi., dkk. 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta : LKIS.
- Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung : Humanlora.
- Marfai, Muh. Aris. 2005. *Moralitas Lingkungan*, Yogyakarta : Wahana Hijau.
- Nikijuluw, Victor P.H., 2001. *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir secara Terpadu*, Makalah pada Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu.

Smith, I.R. 1983. *A Research Framework for Traditional Fishery*.  
ICLARM Studies and Reviews No.2. ICLARM. 45 p.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*.  
Bandung : Aditama.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model  
Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.